

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PACET
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Pacet Tahun Anggaran 2022. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Agustus 2022
PLT. CAMAT PACET



APRIANTO, S.E., M.M

Pembina

NIP. 19690422 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	6
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	9
BAB IV Penutup	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Pacet merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PRKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Pacet yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja Kecamatan Pacet adalah dokumen perencanaan untuk periode Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan `Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) oleh Perangkat Daerah.

3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. Langkah-langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja OPD, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Pacet pada tahun 2022 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)		Aksi
										I		II										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10				11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																			
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	2,870.758.000	-	-	81,55	2,870.758.000	27	784,450,673	49	629.378.585	76	97,44%	1,413.616.458	-	76	1,413.616.458	-	-	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100	15,000,000	-	-	81	15,000,000	27,04	0	18,27	6.550.000	45,31	55.94%	6.550.000	-	0	6.550.000	-	-	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	40	7,500,000	-	-	8	7,500,000	4	0	1	6.550.000	5	-	6.550.000	-	0	6.550.000	-	-	
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	55	7,500,000	-	-	11	7,500,000	5	0	0	0	7	-	1,940,000	-	0	1,940,000	-	-	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	85	2,106.758.000	-	-	81	2,106.758.000	7	352.609.722	9	545.435.321	16	-	898.045.043	-	0	898.045.043	-	-	

		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1 Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140	2,106.758.000	-	-	28	2,106.758.000	7	352.609.722	9	545.435.321	16	-	898.045.043	-	0	898.045.043	-	-	
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.1 Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	85	127.000.000	-	-	81	127.000.000	33,14	17.597,000	38,67	35.173.000	71,81	-	52.7720.000	-	0	52.7720.000	-	-	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.1 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	7,000,000	-	-	1	7,000,000	1	0	0	3.428.000	1	-	3.428.000	-	0	3.428.000	-	-	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.1 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	30,000,000	-	-	4	30,000,000	1	0	1	4.800.000	4	-	4.800.000	-	0	4.800.000	-	-	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.1 Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	25,000,000	-	-	12	25,000,000	3	2.680.000	3	9.675.000	6	-	12.335,000	-	0	12.335,000	-	-	
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.1 Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	10	7.000.000	-	-	2	7.000.000	1	779.000	1	2.550.000	2	-	4,139,800	-	0	4,139,800	-	-	
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.1 Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10	3,000.000	-	-	2	3,000.000	2	765.000	2	735.000	4	-	1,560,000	-	0	1,560,000	-	-	
		6. Penyediaan Bahan/Material	3.1 Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	10	35,000,000	-	-	2	35,000,000	1	8.373.000	1	8.985.000	2	-	17,060,000	-	0	17,060,000	-	-	
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.1 Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	20,000,000	-	-	12	20,000,000	3	5.000.000	3	5.000,000	6	-	10.000,000	-	0	14,810,000	-	-	
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1 Prosentase Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	100	425,000,000	-	-	100	425,000,000	100	387.000.000	0,13	1.800,000	100,13	-	388.800,000	-	0	388.800,000	-	-	
		1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.1 Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	11	425,000,000	-	-	11	425,000,000	11	387.000.000	0	1.800,000	11	-	388.800,000	-	0	388.800,000	-	-	

		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85	99.000.000	-	-	81	99.000.000		17.431.151	50	21.448,64	75	-	31,233,272	-	0	31,233,272	-	-	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1 Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	45,000,000	-	-	12	45,000,000	3	3.931.151	3	7.984.264	6	-	11.879.415	-	0	11.879.415	-	-	
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1 Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	5	54.000.000	-	-	4	54.000.000	4	13.500.000	4	13.500.000	8	-	27.000.000	-	0	27.000.000	-	-	
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85	98.000.000	-	-	81	98.000.000	12,1	9.600.000	22,63	18.972.000	34,73	-	28.572.000	-	0	28.572.000	-	-	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.1 Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	5	38.000.000	-	-	1	38.000.000	1	6.000.000	1	7.200.000	2	-	13.200.000	-	0	13.200.000	-	-	
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3	50,000,000	-	-	3	50,000,000	3	3.600,000	3	8.472.000	6	-	12.072.000	-	0	12.072.000	-	-	
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.1 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	10	10,000,000	-	-	2	10,000,000	1	0	0	3.300,000	1	-	3.300,000	-	0	3.300,000	-	-	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan																			
		1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.1 Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	85	25,000,000	-	-	81	25,000,000	3,43	8.890.000	21,14	3.000.000	189,14	-	11.890,00	-	0	11.890,00	-	-	
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.1Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	3275	25,000,000	-	-	605	25,000,000	168	8.890.000	21,14	3.000.000	189,14	-	11.890,00	-	0	11.890,00	-	-	
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.1 Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	3250	5,000,000	-	-	600	5,000,000	168	0	162	0	330	-	0	-	0	0	-	-	

		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.1 Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	25	105,000,000	-	-	5	20,000,000	0	8.890.000	0	3,000,000	0	-	11.890,000	-	0	11.890,00	-	-	
		2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.2 Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85	1,795,000,000	-	-	81	182.500,000	10	31.384.000	9,	29.846.000	16	-	61.230.000	-	0	61.230.000	10	-	
		1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.1Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	119	1,795,000,000	-	-	23	182.500,000	10	31.384.000	9,	29.846.000	16	-	61.230.000	-	0	61.230.000	-	-	
		1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.1 Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29	20,000,000	-	-	5	17,500,000	2	4,605.000	0	4.134.000	2	-	8.739.000	-	0	8.739.000	-	-	
		2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.1 Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30	182.500,000	-	-	6	20,000,000	2	9.298.000	1	0	2	-	9.298.000	-	0	9.298.000	-	-	
		3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.1 Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30	182.500,000	-	-	5	40,000,000	1	7.890.000	0	10.560.000	3	-	18.450.000	-	0	18.450.000	-	-	
		4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.1 Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	30	17,500,000	-	-	7	105,000,000	1	9.591.000	6,83	15.152.000	2	-	24.743.000	-	0	24.743.000	-	-	
Rata - rata capaian kinerja (%) :																		65.33				
Predikat kinerja :																		sedang				

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pacet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,75	81,15	n/a	n/a	n/a	81%	0%	0%
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%

Perubahan Renja Tahun 2022 Kecamatan Pacet

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	40 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7	5	71%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	55 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	11	7	64%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	81,00%	42,00%	52%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	38	16	42%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	81,00%	81%	81%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50%

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	10 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	12	4	33%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	12 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	81,00%	81,00%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4	0	0%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%

7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan	7 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah service serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	5 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	10 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	55%	68%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	3250 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	750	330	55%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	3250 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	750	330	55%

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	25 pelayanan							
7.01.03	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	35%	43%
7.01.03.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	119 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	23	8	35%
7.01.03.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5	1	20%
7.01.03.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	6	3	50%
7.01.03.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5	1	20%

7.01.03.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	30 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7	3	43%
------------------------	--	---	------------	-----	-----	-----	-----	---	---	------------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 7

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM Kecamatan	-	-	n/a	78	81	81	n/a	79	81	82	-
2	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	n/a	81%	81%	82%	n/a	81%	81%	82%	-
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	n/a	81%	81%	82%	n/a	81%	81%	82%	-
4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	n/a	750	750	755	n/a	772	750	755	-
5	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-	-	n/a	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	n/a	n/a	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	-
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	n/a	66	66	66	n/a	66	66	66	-

7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	n/a	79	79	80	n/a	80,32	79	80	-
8	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	-	-	n/a	80%	81%	82%	n/a	n/a	81%	82%	-
9	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	-	-	n/a	80%	81%	82%	n/a	n/a	81%	82%	-
10	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	n/a	70	71	71	n/a	n/a	71	71	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Pacet diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Pacet

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Pacet bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Pacet yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Pacet;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Pacet namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Pacet yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Pacet untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diPerubahani dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pacet

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pacet	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,73	2.974.132.925	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pacet	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,73	2.974.132.925	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	81	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	81	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	9 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	9 dokumen	7.500.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	66 Laporan	2.011.610.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	66 Laporan	2.011.610.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pacet	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.011.610.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pacet	12 bulan	2.011.610.000	2.067.165.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	IP ASN Perangkat Daerah	81	16.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	81	16.800.000	20.400.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pacet	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	14 stel	16.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pacet	14 stel	16.800.000	20.400.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	81	241.761.048	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	81	241.761.048	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pacet	1 paket	7.000.000	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	112.795.751	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	112.795.751	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	25.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket	7.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket	7.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	3.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	12 bulan	35.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pacet	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pacet	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	20.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat disediakan	81%	425.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat disediakan	81 %	425.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pacet	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit	425.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pacet	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit	425.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	81	101.133.425	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	81	101.133.425	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pacet	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	47.133.425	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pacet	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	47.133.425	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	4 Tenaga Kerja	54.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	4 Tenaga Kerja	54.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81	182.042.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81	182.042.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pacet	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 paket	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pacet	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 paket	30.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pacet	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	131.793.749	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pacet	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	131.793.749	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pacet	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	10.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pacet	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pacet	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pacet	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pacet	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	750 pelayanan	25.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pacet	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	25.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pacet	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5 pelayanan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pacet	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5 pelayanan	5.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Pacet	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	745 pelayanan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Pacet	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 pelayanan	20.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	308.810.500	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	308.810.500	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	25 fasilitasi	308.810.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	25 fasilitasi	308.810.500	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 fasilitasi	128.810.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 fasilitasi	128.810.500	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 fasilitasi	20.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 fasilitasi	20.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pacet	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 fasilitasi	40.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pacet	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 fasilitasi	40.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pacet	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 fasilitasi	120.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pacet	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 fasilitasi	120.000.000	
JUMLAH					3.292.943.425	JUMLAH					3.292.943.425

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Pacet melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Pacet secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pacet

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			NIHIL		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PACET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif (Rp.)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2022	RANKHIR RKPD 2022	BERTAMBA H / BERKURAN G
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN				3.078.258.000	3.292.943.425	214.685.425
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55	81,55	2.870.750.000	2.959.132.925	88.374.925
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	81%	81%	15.000.000	15.000.000	0
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	11 Dokumen	11 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%	81%	2.106.758.000	2.011.6.10.00 0	-95.148.000

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Dokumen	38 Dokumen	2.106.758.000	2.011.6.10.000	-95.148.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70	70	0	16.800.000	16.800.000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1 Paket	0	16.800.000	16.800.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	81%	81%	127.000.000	239.245.751	112.245.751
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000	7.000.000	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	11 Paket	30.000.000	142.245.751	112.245.751
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 Paket	1 Paket	7.000.000	7.000.000	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bacaan Yang Di Sediakan	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	0
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan, kertas, tinta, bolpoin, map. dll	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	81%	81%	425.000.000	425.000.000	0
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	11 unit	425.000.000	425.000.000	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	81%	81%	99.000.000	101.133.425	2.133.425

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	47.133.425	2.133.425
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	54.000.000	54.000.000	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81%	81%	98.000.000	150.343.749	52.343.749
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM kendaraan Operasional selama 12 bulan dan jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 Unit	1 Unit	38.000.000	38.000.000	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	50.000.000	102.343.749	52.343.749
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	61	61	35.000.000	35.000.000	0
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	25.000.000	25.000.000	0
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang terlayani sesuai standart Pelayananperalatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 Pelayanan	5 Pelayanan	5.000.000	5.000.000	0
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	745 Pelayanan	745 Pelayanan	20.000.000	20.000.000	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	81%	182.500.000	296.500.000	114.000.000

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 Fasilitasi	26 Fasilitasi	182.500.000	296.500.000	114.000.000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Fasilitasi	7 Fasilitasi	17.500.000	128.810.500	111.310.500
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	20.000.000	20.000.000	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	40.000.000	40.000.000	0
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Fasilitasi	8 Fasilitasi	105.000.000	120.000.000	15.000.000
TOTAL									3.078.258.000	3.292.943.425	214.685.425

BAB V PENUTUP

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Pacet Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pacet, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Pacet, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Pacet Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pacet diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, Agustus 2022
PLT. CAMAT PACET



APRIANTO, S.E.MM
Pembina

NIP. 19670110 199003 1 007

